



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ELVARINSA**
2. Jabatan : **WAKIL KEPALA BADAN**
3. NHK : **220703**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 9.560.850.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 365 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 4.974.395.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/118 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 1.772.908.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 1.219.575.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/99 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 1.593.972.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 870.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, HONDA TRANSALP Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 140.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 5.603.966.226**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 16.174.816.226

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 16.174.816.226

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.